



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERNA SURYANI
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 928738

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 910.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 375 m2/124 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah Seluas 750 m2 di KAB / KOTA SIJUNJUNG, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 273.500.000

1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 220.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 532.143.830

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.935.643.830

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.935.643.830

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.